



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

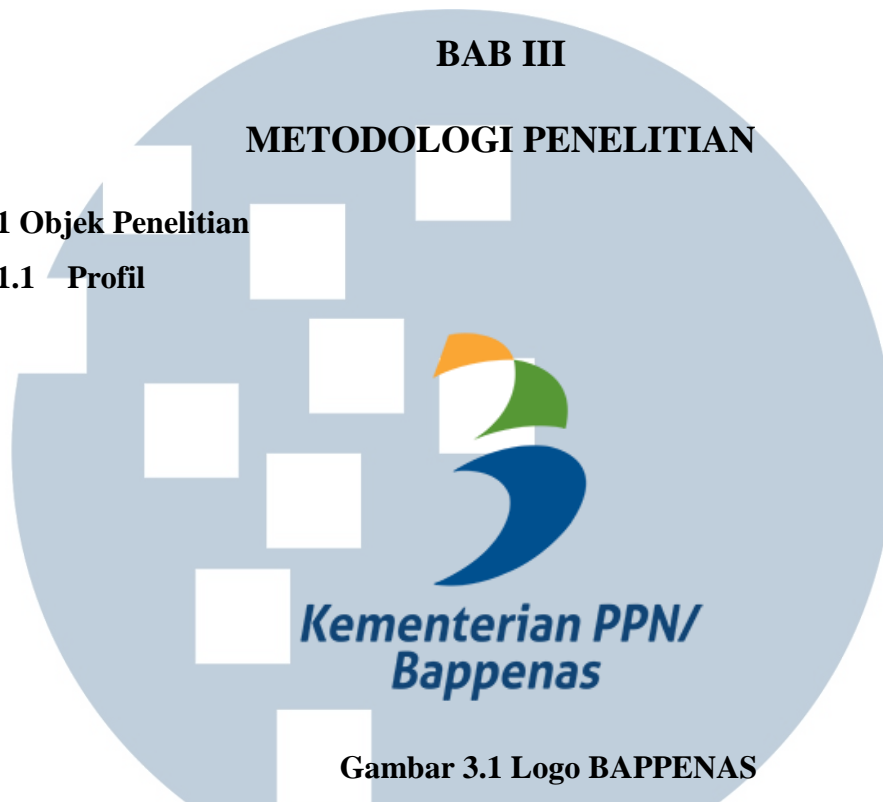
This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1.1 Objek Penelitian

1.1.1 Profil



Gambar 3.1 Logo BAPPENAS

Sejarah Bappenas dimulai sejak masa proklamasi kemerdekaan NKRI pada Agustus 1945. Menyusul proklamasi, Indonesia tidak serta-merta diakui kedaulatannya oleh dunia. Diperlukan berbagai perjuangan baik secara fisik maupun diplomasi untuk sampai kepada berdirinya Kabinet Republik Indonesia Serikat pada 23 Desember 1949 menyusul kesepakatan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.

Pada rentang waktu itu, diperlukan berbagai persiapan dalam menghadapi perundingan dengan Belanda serta adanya kebutuhan untuk menyelesaikan persoalan pembangunan negara. Adalah Menteri Kemakmuran AK Gani yang pada Kabinet Sjahrir III membentuk Badan Perancang Ekonomi yang bertugas merumuskan rencana pembangunan yang dikhususkan pada pembangunan ekonomi jangka dua sampai tiga tahun. Kemudian pada 12 April 1947, pemerintah

menerbitkan Penetapan Presiden No. 3/1947 yang melahirkan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (PPSE). Panitia inilah yang menghasilkan dokumen perencanaan pertama dalam sejarah perencanaan pembangunan di Indonesia, yaitu dokumen “Dasar-dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia.”

Kelembagaan badan perencanaan nasional kemudian mengalami perubahan seiring dengan dinamika nasional Indonesia. Akibat terbaginya fokus antara pelaksanaan tugas dan menghadapi Belanda melalui peperangan dan diplomasi, PPSE menjadi tidak dapat melaksanakan tugas sepenuhnya. Eksistensi pemikiran PPSE kemudian dilanjutkan oleh tiga kelembagaan yaitu Kepanitiaan pada Kementerian Perdagangan dan Industri, Dewan Perancang Negara dan Biro Perancang Negara, serta Dewan Perancang Nasional (Depernas).

Sidang Umum II pada tanggal 24 Desember 1963 kemudian menjadi tonggak Bappenas. Presiden Soekarno, yang ditugasi MPRS untuk menata kembali lembaga perencanaan pembangunan, melalui Ketetapan No. 12/1963 mengintegrasikan Depernas dan Badan Kerja Depernas ke dalam Kabinet Kerja, sekaligus membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kemudian pada era Orde Baru dibentuklah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan pada 1980 dibentuklah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi dan di setiap Kabupaten/Kota. Bappeda bertugas memadukan perencanaan nasional dan daerah mengikuti kebijakan mengenai otonomi daerah. Pada era ini pula disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (PJP) I dan II, masing-masing mencakup waktu 25

tahun dan diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I-X (1969–2019) yang sayangnya harus terhenti menjelang akhir Repelita VI. Krisis ekonomi, sosial, politik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berujung bubarnya Kabinet Pembangunan VII dan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

Di masa reformasi, Bappenas sempat dipimpin kepala yang tidak merangkap jabatan menteri negara pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Baru pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, posisi Bappenas kembali menjadi setingkat kementerian. Bappenas kemudian bertugas untuk menjabarkan GBHN ke dalam rencana pembangunan lima tahunan dan tahunan, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya. Tugas ini diperkuat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan penugasan Bappenas dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 secara teknokratis dan partisipatif.

1.1.2 Visi dan Misi

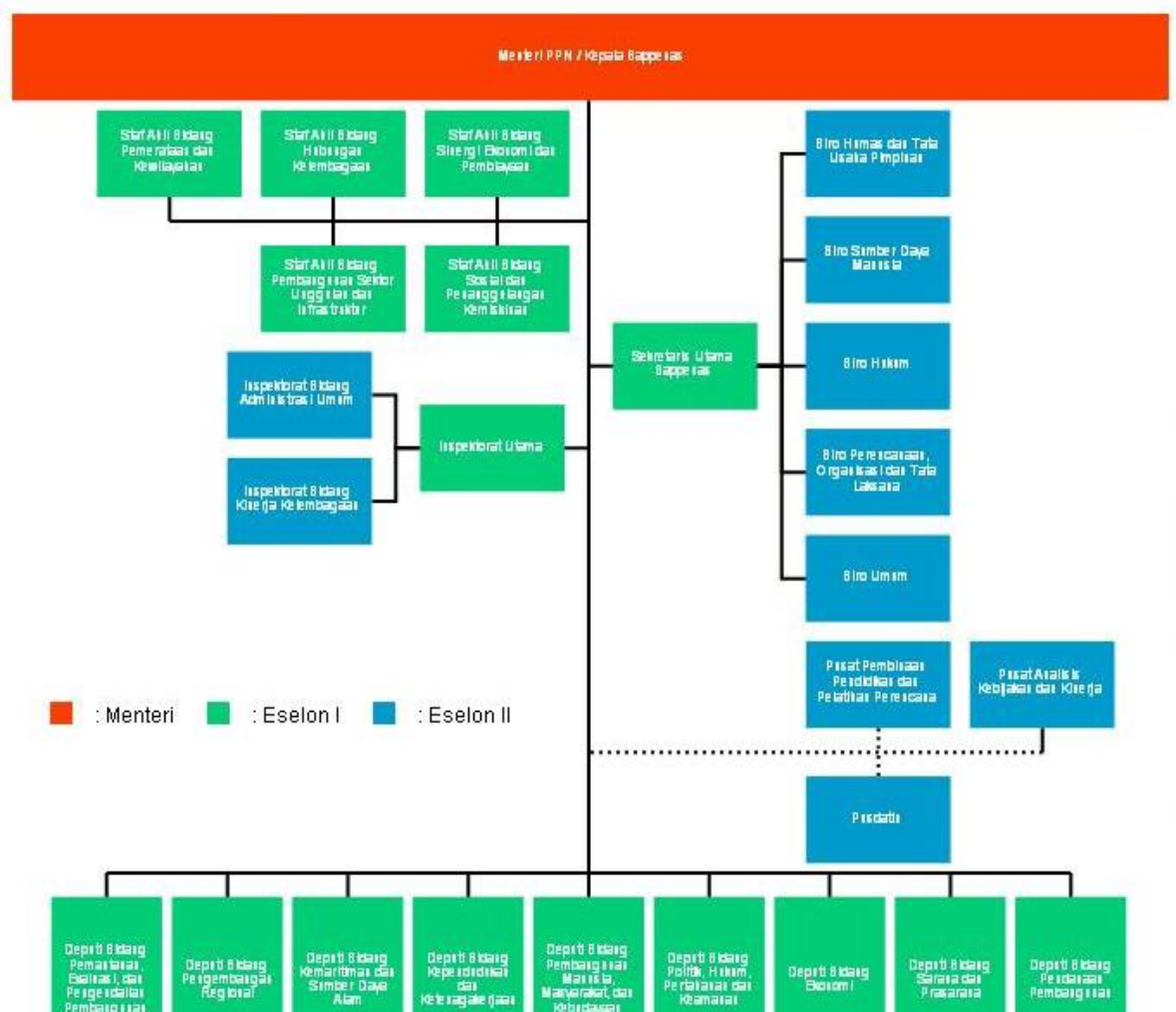
”Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”

Misi Kementerian PPN/Bappenas periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);

2. melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional.
3. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

1.1.3 Struktur Organisasi



Sumber : BAPPENAS

Gambar 3.2 Struktur organisasi BAPPENAS

Struktur organisasi yang ada di BAPPENAS terdiri dari:

1. Menteri PPN / Kepala BAPPENAS
2. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan
3. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
4. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan
5. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur
6. Staf Ahli Bidang Sosial dan
7. Sekretaris Utama Bappenas
 - 7.1 Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
 - 7.2 Biro Sumber Daya Manusia
 - 7.3 Biro Hukum
 - 7.4 Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
 - 7.5 Biro Umum
8. Inspektorat Utama
 - 8.1 Inspektorat Bidang Administrasi Umum
 - 8.2 Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan
9. Deputi Bidang Pemerataan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
10. Deputi Bidang Pengembangan Regional
11. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
12. Deputi Bidang Kependidikan dan Ketenagakerjaan
13. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
14. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
15. Deputi Bidang Ekonomi

16. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana

17. Deputi Bidang Pendataan Pembangunan

1.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian evaluasi manajemen mutu di BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) menggunakan sebuah standar manajemen mutu yaitu ISO 9001:2015. ISO 9001:2015 dipilih karena kerangka kerja ini cakupannya cukup lengkap dan detail untuk menilai dan membantu instansi untuk mencapai level target yang diinginkan mengenai sistem manajemen mutu. Di standar ISO 9001:2015 ini terdapat 10 klausul. Kesepuluh klausul ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup
2. Acuan normatif
3. Istilah dan definisi
4. Konteks organisasi
5. Kepemimpinan
6. Perencanaan
7. Dukungan
8. Operasi
9. Evaluasi kinerja
10. Peningkatan

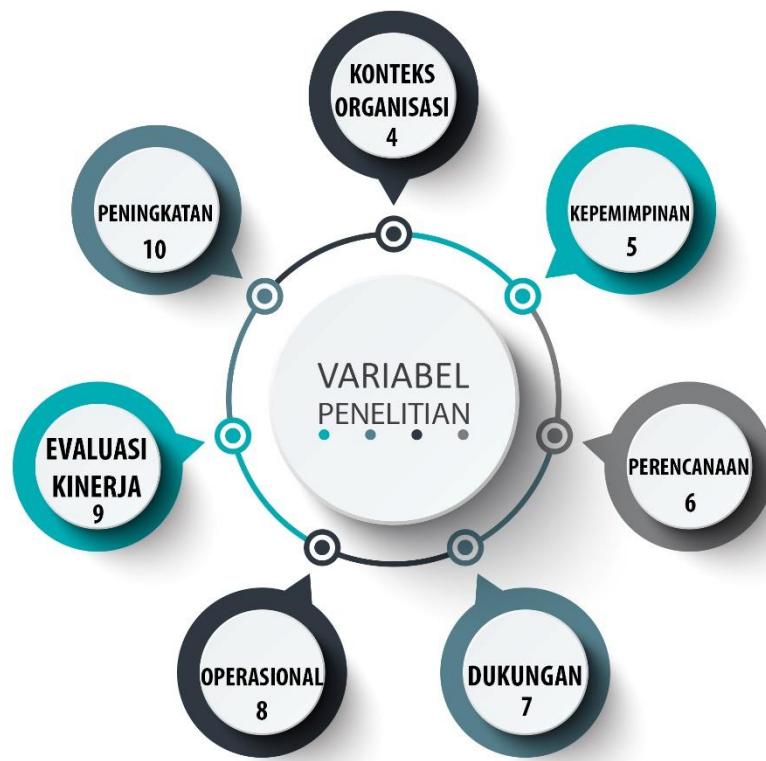
Namun yang digunakan sebagai acuan penilaian hanyalah 7 klausul, yaitu klausul 4 sampai dengan klausul 10. Klausul 1 sampai klausul 3 tidak dijadikan acuan penilaian karena hanya berisi sebagai pengantar ISO 9001.

1.3 Variabel Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menilai sistem manajemen mutu yang ada di BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dengan menggunakan ISO 9001 : 2015. Penelitian ini dimulai dari melakukan pembelajaran terhadap instansi yang akan diteliti. Kemudian dilakukan pengambilan data dengan cara pengisian kuesioner yang sesuai dengan standar ISO 9001 tahun 2015 mengenai sistem manajemen mutu. Seiring kuesioner terisi oleh semua responden yang dituju, akan dilakukan wawancara terhadap pihak yang bertanggung jawab dan paling memahami seluruh hal dalam instansi terkait sistem manajemen mutu.

Klausul yang menjadi variabel pada penelitian ini adalah konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dukungan, operasi, evaluasi kinerja dan peningkatan. Klausul konteks organisasi membahas mengenai segala hal yang berkaitan dengan organisasi, misalnya isu internal dan eksternal yang mungkin terjadi, kebutuhan dan harapan bagi instansi, ruang lingkup sistem manajemen mutu yang ada, dan proses dari sistem manajemen mutu instansi.

U M N
U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A



Gambar 3.3 Variabel Penelitian

1.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang didapat dengan melakukan observasi ke lapangan. Dalam penelitian ini data primer hasil dari kuisisioner ISO 9001 : 2015 yang dibuat untuk mengetahui kondisi kesiapan manajemen mutu. Ada 10 orang yang menjadi responden.

Diantaranya 1 orang kepala biro, 1 orang kepala bagian dan 8 orang karyawan.

3.4.1. Kuisisioner

Pemilihan responden ini dipilih berdasarkan pihak yang bertanggung jawab dan terlibat langsung dengan pembuatan sistem manajemen mutu

yang pernah ada dan sedang berjalan di BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional).

Pernyataan yang dibuat sesuai dengan yang ada di modul ISO 9001 : 2015 dengan beberapa penyesuaian agar responden tidak bingung dalam mengisi kuisisioner yang diberikan. Penyesuaian yang dimaksud adalah dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan jelas.

No	Kategori	Skor
1	SS : Sangat Setuju	5
2	S : Setuju	4
3	N : Netral	3
4	TS : Tidak Setuju	2
5	STS : Sangat Tidak setuju	1

Gambar 3.4 Kriteria Penilaian

Jumlah pertanyaan yang ada pada kuisisioner yang diajukan berjumlah 23 pertanyaan yang sesuai dengan standar ISO 9001 : 2015.

Contoh pertanyaan kuisisioner dapat dilihat pada gambar 3.5 :

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Pimpinan mendukung dan berperan penting dalam keberhasilan penerapan sertifikasi ISO 9001. (5)					

Gambar 3.5 Contoh Pertanyaan

Pengisian kuisisioner menggunakan bentuk tanda centang (√) pada kolom yang sesuai di setiap pertanyaan. Kuisisioner yang telah diisi oleh responden, kemudian dihitung menggunakan *Microsoft Excel* untuk mempermudah menganalisis data. Data penelitian yang diambil dari

kuisisioner responden yang telah dipindahkan selanjutnya data tersebut akan diolah. Caranya dengan menggunakan rumus pada gambar 3.6 & 3.7 :

$$\text{Rumus Index \%} = \frac{\text{Total Skor}}{Y} \times 100$$

Gambar 3.6 Rumus Skala *likert*

$$\text{Skor} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Kuesioner (A)}}{\text{Jumlah Pertanyaan (B)}} \times 100\%$$

Gambar 3.7 Rumus *Maturity level*

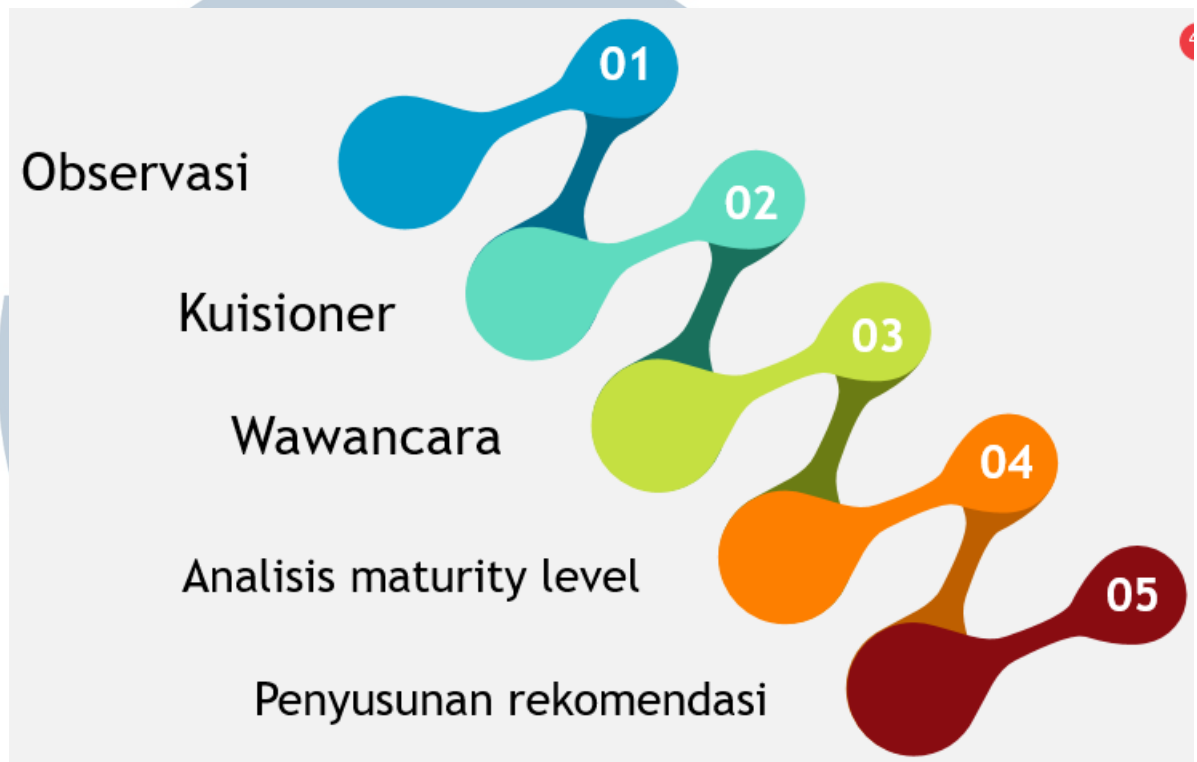
3.4.2. Wawancara

Pada tahap pengumpulan data wawancara dan melakukan wawancara mengenai sistem manajemen mutu di BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara terstruktur dan terbuka.

Wawancara tersebut dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi dan untuk memastikan responden terhadap jawaban yang akan dipilihnya. Hasil wawancara yang didapatkan akan digunakan sebagai data pendukung.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

1.5 Kerangka Teori Penelitian



Gambar 3.8 Kerangka Teori Penelitian

1. Observasi

Pada tahap ini dilakukan proses penelitian dimulai dengan mendatangi langsung instansi BAPPENAS dan menentukan batasan yang akan dievaluasi. penentuan batasan dilakukan untuk bertemu dengan pihak yang berwenang dalam segala urusan instansi.

2. Kuisisioner

Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan kuisisioner dilakukan dengan mengacu pada aktivitas tiap klausul yang ada di standar ISO 9001 : 2015.kemudian dilakukan pengisian kuisisioner oleh responden yang telah ditentukan.

3. **Wawancara**

Pada tahap ini dilakukan proses wawancara sesuai dengan yang tertera di klausul standar ISO 9001 : 2015 mengenai sistem manajemen mutu. Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu BAPPENAS.

4. **Analisis *maturity level***

Setelah hasil kuisisioner dan wawancara didapat, kemudian *level* dapat dihitung dengan mencari rata-rata pada masing-masing proses di masing-masing klausul. Dari hasil kuisisioner dan wawancara tersebut, dapat menganalisa tingkat kematangan yang instansi peroleh dan membandingkan dengan tingkat tarket yang diinginkan.

5. **Penyusunan Rekomendasi**

Setelah dilakukan analisa, dapat memberikan rekomendasi terkait sistem manajemen mutu yang ada di instansi untuk meningkatkan kualitas instansi. Penyusunan rekomendasi dilakukan berdasarkan aktivitas yang ada pada standar ISO 9001 : 2015.

